

PELAJARAN BAHASA SUNDA DI KABUPATEN CIREBON

SUNDA LANGUAGE EDUCATION IN CIREBON REGENCY

Kusmanto, Imam Setyobudi, Yuyun Yuningsih

kusmanto0412@gmail.com

Prodi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media
Institut Seni Budaya Indonesia

Artikel diterima: 11 September 2021 | **Artikel direvisi:** 23 Juli 2022 | **Artikel disetujui:** 7 Juli 2024

ABSTRAK

Perda No 5 Tahun 2003 menegaskan bahasa ibu masyarakat Jawa Barat terdiri dari Sunda, Cirebon dan Melayu-Betawi. Praktik kebijakan ini dijalankan melalui muatan lokal mata pelajaran bahasa daerah yang diatur dalam dinas pendidikan kabupaten/kota. Bahasa Cirebon menjadi salah satu dari mulok yang wajib diajarkan di wilayah penutur bahasa Cirebon. Adapun dalam praktiknya bahasa Sunda masih ditemukan diajarkan di sekolah-sekolah yang masyarakat sekitarnya tidak berbicara bahasa Sunda termasuk di kabupaten Cirebon. Hal ini tentunya menjadi masalah khususnya bagi para siswa yang sejak kecil berbahasa Cirebon. Hasil penelitian menemukan penyelenggaraan pendidikan bahasa daerah sudah sesuai dengan payung hukum yang dibuat namun dalam praktiknya mengalami berbagai macam kendala. Dampaknya penyelenggaraan kebijakan di tiap sekolah tidak saling bersinergi dan berintegrasi. Faktor-faktor yang memengaruhi adalah anggaran, kurikulum, dan SDM tiap satuan pendidikan yang berbeda-beda. Implikasinya siswa yang mempelajari bahasa Sunda mengalami kesulitan dengan tingkat dan derajat masing-masing.

Kata kunci: Kabupaten Cirebon, Bahasa daerah, kebijakan pendidikan

ABSTRACT

Regional Regulation No. 5 of 2003 confirms that the mother tongue of the people of West Java consists of Sunda, Cirebon and Malay-Betawi. The practice of this policy is carried out through the local content of regional language subjects regulated in the district/city education office. Cirebon language is one of the mulok that must be taught in Cirebon language-speaking areas. In practice, Sundanese is still found being taught in schools where the surrounding community does not speak Sundanese, including in Cirebon district. This is certainly a problem, especially for students who have spoken Cirebon since childhood. The results of the study found that the implementation of regional language education was in accordance with the legal umbrella made but in practice encountered various kinds of obstacles. The impact is that the implementation of policies in each school does not synergize and integrate with each other. The influencing factors are the different budgets, curriculum, and human resources of each educational unit. The implication is that students who study Sundanese have difficulty with their respective levels and degrees.

Keywords: Cirebon Regency, regional language, education policy

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling universal (Koentjaraningrat 1992: 202-204).

Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa tidak ada satu pun masyarakat dan kebudayaan yang hidup di muka bumi ini

yang tanpa bahasa. Selain itu, bahasa identik dengan identitas suatu budaya kelompok masyarakat tertentu karena setiap kelompok masyarakat dapat mengembangkan bahasa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Koentjaraningrat 1992: 339- 342).

Penulis berlatar-belakang kelahiran Kabupaten Cirebon yang berasal dari kedua orang-tua keturunan asli Cirebon. Cirebon, dalam hal ini, sebagai sebuah identitas budaya suku-bangsa sekaligus penunjuk batas-batas geografi yang didasarkan geo-politik administratif wilayah kabupaten. Semenjak dahulu, kedua orang-tua dan orang-orang dewasa sekitar penulis memperkenalkan bahasa sehari-hari dalam percakapan dan interaksi sosial menggunakan bahasa Cirebon yang sedikit berbeda dengan bahasa Jawa dan sangat berbeda dibandingkan bahasa Sunda. Lingkungan budaya yang relatif homogen ini merupakan pengalaman empirik yang membentuk identitas diri penulis tentang keanggotaan daripada suatu suku-bangsa dan budaya tertentu: kelompok suku-bangsa Cirebon.

Sulit memungkiri bahwa di dalam penggunaan praktis sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain menggunakan bahasa ibu yang sama, tiada lain, sebuah cerminan pembentukan kesamaan identitas budaya. Pengalaman empirik penulis berlangsung semenjak balita sampai dengan pelajar SMA relatif tinggal di Kabupaten Cirebon. Penulis hanya menyerap pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan identitas dan bahasa. Bahkan, sewaktu penulis sempat pernah pergi berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ternyata masih ditemukan kesamaan bahasa dan budaya: suku-bangsa Cirebon.

Pengalaman penulis memperoleh penegasan Setyobudi bahwa identitas

budaya tertata berdasar kaidah perbedaan, bukan cerminan *state of being* yang tetap dan alamiah, melainkan *becoming*. Identitas budaya merujuk pada pengalaman bersama senasib sepenanggungan. Politik identitas berkenaan erat dengan kepentingan anggota-anggota suatu kelompok sosial yang merasa terpinggir atau tersingkir atas arus utama, dalilnya ketidakadilan menumbuhkan kesadaran golongan (2017: 58).

Problem itu muncul, pada saat, penulis menempuh pendidikan sekolah formal bangku SD, SMP, dan SMA yang salah satu mata pelajarannya bahasa Sunda sebagai mata pelajaran muatan lokal: kenapa mesti belajar bahasa Sunda? Pertanyaan ini timbul akibat pengalaman empirik penulis yang tidak pernah menggunakan bahasa percakapan dan budaya Sunda dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tentu saja, penulis dan banyak teman sekelas yang kesulitan belajar bahasa Sunda karena relatif belum akrab dari adanya perbedaan kosa kata beserta aksara.

Ironisnya, bahasa Cirebon sebagai salah satu bahasa daerah yang memperoleh penegasan formal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah pada bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa bahasa daerah di Provinsi Jawa Barat terdiri dari bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan bahasa Melayu-Betawi. Artinya bahasa Sunda tidak seharusnya diajarkan secara merata di wilayah administrasi Jawa barat mengingat keberadaan bahasa lain. Selain itu, pengakuan keberadaan suku-bangsa Cirebon tertera pula pada Sensus Penduduk BPS 2010. Fakta ini harusnya sudah cukup melegitimasi keberadaan budaya dan bahasa Cirebon sehingga pembelajaran bahasa daerah tidak akan menggunakan bahasa Sunda lagi melainkan Cirebon. Kenyataan seperti ini, ditunjukkan dalam penelitian

Kusnandar, kebijakan birokrat pemerintah provinsi gedung sate tidak konsisten dengan peraturan sebagai payung hukum legalitasnya (2012: 14). Salah satu contohnya pada kebijakan pembelajaran mata pelajaran bahasa daerah di Kabupaten Cirebon yang masih berlangsung sampai dengan sekarang ini. Padahal warga penduduk Cirebon tidak pernah menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda, kecuali pada daerah tertentu saja seperti di Kecamatan Lemahabang dan beberapa kecamatan di Cirebon Timur.

Dengan demikian, permasalahan yang muncul sebagai pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Bagaimana kebijakan pendidikan yang terkait dengan pelajaran bahasa daerah di Kabupaten Cirebon? 2) Apa dampak akibat kebijakan pendidikan tentang pelajaran bahasa Sunda di SDN 5 Arjawinangun, SMPN 2 Ciwaringin, dan SMAN 1 Palimanan? 3) Bagaimana penerimaan murid-murid terhadap mata pelajaran bahasa Sunda yang tidak sesuai dengan akar pengalaman (ingatan kolektif) latar-belakang budaya Cirebon?

Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan upaya diperolehnya pemahaman dan deskripsi mendalam terhadap fenomena sosial-budaya seturut pandangan dan pendapat orang-orang yang diteliti (Setyobudi 2020: 19).

Sumber data dalam perolehan informasi terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, maka data primer dikumpulkan menggunakan instrumen penulisnya sendiri sebagai pengumpul data.

Pendekatan yang digunakan adalah resepsi Stuart Hall yang berusaha memahami pemaknaan yang muncul berdasarkan pengalaman empirik khalayak. Bagaimana instrumen pendidikan di sekolah seperti guru dan

murid memaknai pesan yang dikomunikasikan dengan kebijakan politik yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan khususnya di beberapa sekolah di kabupaten Cirebon disesuaikan dengan kondisi pandemi dan protokol kesehatan. kondisi ini akan mempengaruhi bagaimana pengumpulan data diperoleh. tahapan operasional penelitian yang di dalamnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di tiga sekolah di kabupaten Cirebon, SDN 5 Arjawinangun, SMPN 1 Ciwaringin dan SMAN 1 Palimanan.

B. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan partisipan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.

2. Studi dokumen

Perolehan data dilakukan dengan membaca literatur pokok dan penunjang dalam berbagai buku, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah serta berbagai sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

3. Observasi

Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2010:112). Pola observasi dapat mencakup proses pembelajaran bahasa daerah, penggunaan bahasa sehari-hari, baik dilingkungan sekolah maupun rumah antara murid, guru maupun orang tua

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik politik identitas: dominasi bahasa Sunda dan Jawa di Cirebon

Pentingnya bahasa ibu untuk diberdayakan fungsinya sejalan dengan program UNESCO yang telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Upaya pelestarian bahasa ibu kemudian secara teknis masuk pada dua lembaga yang menjadi implementor kebijakan terkait bahasa daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat sebagai sektor utama. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dalam hal ini balai bahasa Jawa Barat sebagai organisasi pendukung melalui pelestarian bahasa ibu melalui pengembangan penelitian serta penerapan kebijakan Pendidikan melalui pengembangan kurikulum muatan lokal.

Kedua organisasi ini tidak berhubungan langsung dengan dinas atau organisasi serupa di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. Beberapa organisasi pelaksana Perda di tingkat kabupaten/kota dapat tidak sejalan dengan organisasi pelaksana di tingkat provinsi. Belum lagi undang-undang yang membebaskan kebijakan di tiap tingkatan yang bertujuan untuk menyesuaikan situasi kondisi lapangan. Artinya koordinasi dinas antar kabupaten/kota dengan provinsi belum maksimal. Kurangnya koordinasi lembaga pelaksana kebijakan ini dapat berdampak pada terhambatnya berbagai program yang dilaksanakan dari satu dinas ke dinas yang lain. Sekalipun ada dinas atau lembaga pelaksana yang sama, belum tentu Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung program yang digulirkan oleh Disbudpar Jawa Barat, termasuk kota/kabupaten Bekasi dan Cirebon. Dewi (2016), menyatakan:

“Hasil pengumpulan data di kedua kota tersebut menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan Disbudpar Jawa Barat, tidak mendapat respons dari pemerintah kota tersebut. Demikian juga dengan kegiatan pelatihan guru bahasa daerah yang diselenggarakan

BPBDK Jawa Barat. Tidak mendapat respons. Respons dalam hal ini, berupa dukungan izin dan anggaran pendukung kegiatan”.

Sahnya undang-undang yang tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2003 mendapat respon baik bagi masyarakat umum yang diwakili oleh komunitas-komunitas bahasa dan pemerhati sastra daerah di Cirebon. Hasil revisi Perda tersebut menunjukkan apresiasi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melihat keberagaman suku bangsa yang ada di Jawa Barat. Pengakuan bahasa Cirebon dan Melayu Betawi sebagai salah satu bahasa ibu masyarakat Jawa Barat memutus stigma buruk provinsi yang sebelumnya dianggap hanya mengakui bahasa dan sastra Sunda saja. Hal tersebut didukung baik dikarenakan dengan adanya perda minimal bahasa dan sastra Cirebon dapat dilestarikan sejalan dengan tujuan lembaga pemerintah seperti disbudpar dan diaplikasikan dalam muatan lokal yang diatur oleh dinas pendidikan.

Pelestarian bahasa dan sastra Cirebon dalam praktiknya tidak seberuntung bahasa dan sastra Sunda. Pertama jika dilihat berdasarkan jumlah penutur bahasa, Cirebon kalah jauh dengan Sunda. Penuturnya berkonsentrasi pada satu titik. Adapun dalam lingkup yang lebih kecil, penggunaannya mendominasi wilayah kabupaten dan kota Cirebon termasuk Indramayu dan beberapa kabupaten di sekitarnya saja. Hal tersebut masih lebih beruntung dibandingkan bahasa Melayu-Betawi yang hanya digunakan di kabupaten dan kota Bekasi serta Depok, itu pun bukan semua kecamatan. Jumlah penutur bahasa Cirebon dan bahasa Melayu Betawi yang sedikit ini mengakibatkan pelestariannya sangat bergantung pada lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Logikanya semakin sedikit jumlah penutur suatu bahasa maka semakin

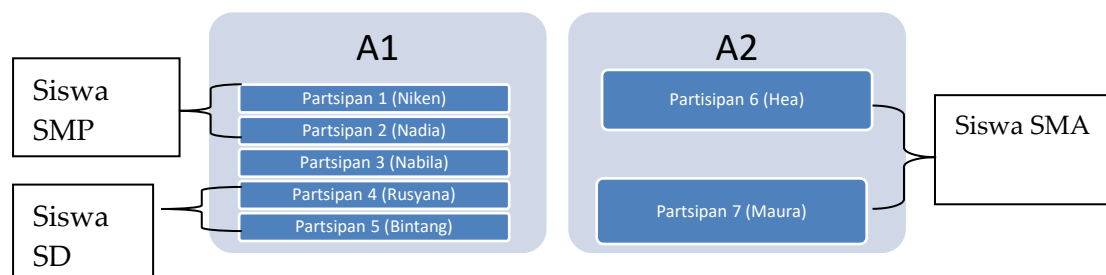
sedikit pula orang yang peduli atau mau memperjuangkan bahasa tersebut untuk dilestarikan. Faktor lain adalah keterbatasan buku ajar, anggaran honor dan kompetensi bahasa Cirebon. Adanya prodi di universitas juga mendukung pengkajian program studi sehingga banyak kajian akademis terkait bahasa dan sastra Sunda. "Menurut lembaga bahasa lan sastra Cirebon penelitian bahasa Cirebon lebih banyak dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta karena sebelum perda nomor 5 tahun 2003 ditetapkan, bahasa Cirebon lebih dianggap sebagai bahasa Jawa dialek Cirebon" (Dewi, 2016: 17).

B. Resepsi murid sekolah atas dua mata pelajaran bahasa daerah di kabupaten Cirebon.

Dalam proses decoding faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan dan juga pengalaman dalam komunitas mempengaruhi khalayak saat memaknai pesan (Tunshorin, 2016:75). Artinya kebijakan bahasa daerah tidak dapat bisa disamaratakan setiap kabupaten/kota meskipun dalam satu ruang lingkup yang sama: Jawa Barat. Jenis khalayak resepsi sangat besar dan luas serta menyentuh sendi-sendi masyarakat paling dalam yakni individu. Banyak faktor dalam proses decoding mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah diberlakukan khususnya di wilayah administrasi politik yang multikultur.

pendidikan di satu wilayah meskipun memiliki faktor yang sama tidak akan di resepsi kan serupa pula. Faktor kultur memiliki peranan kunci dalam menjembatani setiap gap dari faktor-faktor yang disebut sebelumnya. Resepsi merupakan tanggapan dan kesan dari informan atau partisipan terhadap bahasa daerah yang mendukung partisipan dalam menerima/menegosiasi/menolak bahasa daerah, utamanya bahasa Sunda di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data lapangan persepsi pertama kali muncul melalui kesan pertama partisipan ketika mempelajari bahasa dan sastra Sunda di sekolah dasar. Metode pembelajaran translate bahasa Sunda meninggalkan kesan tersendiri dalam benak partisipan sehingga muncul reaksi tertentu terhadap kehadiran bahasa daerah lain. Munculnya respon partisipan kepada bahasa daerah juga tidak lepas dari peran bahasa daerah tersebut. Hal ini jelas menentukan bagaimana suatu bahasa diterima di dalam masyarakat. Korelasi berkaitan dengan tinggi rendahnya motivasi dan strategi belajar. Berdasar pada temuan data di bab 3, analisis praktis digunakan sebagai gambaran kecakapan para narasumber dalam memahami bahasa Sunda menggunakan standar CEFR dapat dilihat sebagai berikut;



Bagan 1. Kecakapan berbahasa narasumber berdasarkan CEFR

Usia, jenis kelamin, dan tingkat

Enam tahun dari tingkat sekolah

dasar harusnya cukup bagi siswa untuk mencapai level kemahiran pada tingkat B1 ketika masuk pada jenjang sekolah menengah. Faktanya kemampuan berkomunikasi Rusyana dan Bintang dalam bahasa dan sastra Sunda tidak menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan Nadia, Niken, dan Nabila. Pemahaman Maura dan Dhea memang lebih baik dibandingkan partisipan di tingkatan satuan pendidikan dibawahnya namun tetap tidak banyak berpengaruh. Level CERF juga tidak merata mulai dari A2, B1. Level B2 jumlahnya cukup langkah, itupun jika ada adalah siswa yang sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Siswa yang memang merupakan orang Sunda nilainya pun belum tentu bagus secara akademik mengingat banyaknya konten sastra yang diajarkan pada tingkat SMA. Artinya jika siswa yang secara kultur saja sudah menjadi bagian dari suku-bangsa Sunda, bagaimana dengan nasib siswa beretnis lain yang harus memahami dua kali lebih berat.

Partisipan dari tiga tingkat pendidikan umumnya memiliki masalah utama yakni kelemahan pada percakapan yang gagap. Siswa SD hingga, Rusyana di tingkat SMP malu dan tidak mau berbicara satu kata menggunakan bahasa Sunda ketika peneliti melakukan wawancara tatap muka. Isu utama terhadap lambatnya bahasa dan sastra Sunda berkembang adalah pengajarannya yang kurang praktikal. Bahasa memerlukan tingginya intensitas dibandingkan durasi belajar. Artinya pembelajaran yang dilakukan satu kali empat jam dalam jangka 7 hari akan memerlukan waktu penguasaan bahasa yang cukup lama. Berbanding terbalik jika pembelajaran dilakukan misalnya hanya 1 jam namun dilakukan selama 7 hari.

Motivasi dipandang sebagai

faktor yang memberikan kontribusi dalam memberikan pengaruh atau kecenderungan karena ketika partisipan menyukai dan menerima bahasa dan sastra daerah lain tingkat kesukaan dan penerimaan tersebut dapat menurun atau bertambah sesuai dengan motif pribadi. Motif yang dimiliki ibu Titi terfokus pada satu tujuan untuk kepentingan pribadi. Baginya mempelajari bahasa daerah lain termasuk Sunda hanya diperlukan jika kita memiliki kepentingan tertentu yang melibatkan bahasa dan sastra daerah di dalamnya. Menempuh pendidikan di wilayah penutur bahasa Sunda menjadi salah satunya. Tidak jauh berbeda terhadap apa yang dilakukan Bu Ita ketika berbisnis dengan orang Sunda. Penggunaan bahasa Sunda yang terbatas dan terkonsentrasi pada satu area bidang: transaksi jual beli menjadikannya terbiasa dengan bahasa Sunda dalam konteks tersebut.

Dapat dikatakan berdasarkan data yang diperoleh pada bab 3, bersedianya partisipan dalam mempelajari bahasa dan sastra Sunda bukan untuk melestarikan identitas suku bangsa. Partisipan bersedia mempelajari bahasa dan sastra Sunda untuk kepentingan dan motivasi pribadi masing-masing. Komunikasi fungsional adalah tujuan utama sebagian partisipan menerima bahasa Sunda. Motif seperti bisnis, dan pendidikan menjadi faktor pendorong partisipan terutama murid sekolah. Adapun mata pelajaran bahasa dan sastra Cirebon lebih ditekankan untuk kepentingan identitas kesukuan, bukan pengetahuan layaknya bahasa dan sastra Sunda.

Kebijakan pemerintah melalui penggunaan bahasa daerah sebagai muatan lokal yang tidak sesuai dengan latar belakang kultur siswa jelas masuk sebagai kriteria yang kurang baik. Pemahaman bahasa yang didasari atas kebijakan pemerintah melalui dinas pendidikan yang tertuang di dalam kurikulum pendidikan akan sangat membantu siswa dan warga negara

secara umum untuk mengenalkan suatu bahasa misalnya bahasa nasional persatuan seperti bahasa Indonesia. Regulasi bahasa daerah yang diwajibkan negara akan bermasalah pada konsistensi dan komitmen belajar, jika dalam aplikasinya kurang melihat pada beberapa faktor seperti penggunaan suatu bahasa di lingkungan terbatas. Sebagai contoh, siswa yang berasal dari Maluku yang pindah dan bersekolah di Tasikmalaya akan dipaksa melalui sekolah untuk mempelajari bahasa dan sastra Sunda. Kasus ini menggambarkan bahasa dan sastra Sunda yang dikenalkan secara paksa sebagai alat bantu sosialisasi siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Berdasarkan bagan golongan pembelajar bahasa menurut Lururiuw, pola kuadran praktikal-instrumental digunakan secara otomatis sebagai filter budaya yang masuk. Dampaknya, sang anak dapat cepat memperoleh teman dan bergaul menggunakan bahasa dan bahkan ikut melestarikan budaya Sunda. Artinya terlepas dari paksaan kebijakan pemerintah, sang anak tetap mendapat manfaat dari materi yang ia pelajari dengan catatan penggunaan bahasa lokal sebagai media penerima bagian dari kelompok. Sayangnya, kasus yang sama kemungkinan tidak dapat terjadi jika siswa tersebut dipindahkan ke Cirebon atau kabupaten/kota dimana masyarakatnya merupakan penutur bahasa Cirebon.

Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap penerimaan bahasa dan sastra Sunda dalam sehari-hari para siswa, guru, hingga orang tua di Kabupaten Cirebon. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong partisipan untuk semakin menerima atau menolak menjadikan budaya dan sastra Sunda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa tingkat kemahiran bahasa partisipan berada di bawah level yang seharusnya dimana mereka berada dapat berarti satu hal.

Terjadi penerimaan peran yang sebenarnya terpaksa diterima. Pihak penerima pesan baik siswa, guru hingga satuan pendidikan atau sekolah tidak berdaya menolak paksaan bahasa dan sastra Sunda untuk diajarkan, sekalipun materi yang diajarkan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pola penerimaan komunikasi kebijakan Pendidikan bahasa daerah

Berdasarkan temuan data lapangan, guru, murid, dan orang tua berada pada satu posisi yang sama: *oppositional reading*. Beberapa partisipan memiliki keraguan melihat keberadaan bahasa dan sastra utamanya Sunda di sekolah (*negotiated*). Kelompok *negotiated* ini berusaha untuk berkompromi dari kewajiban yang diharuskan oleh sekolah. Penerimaan pesan ini juga bukan ditandai sebagai penerimaan melainkan keterbatasan atau kelumpuhan satu pihak dalam menggunakan nilai-nilai bawaan dalam hal ini bahasa dan sastra Cirebon. Alhasil pihak yang menolak berusaha berkompromi dengan tetap mempelajari bahasa dan sastra Sunda namun terbatas pada konteks “pelajaran sekolah”. Adapun tujuan dan maksud pelajaran diajarkan dimaknai secara berbeda tidak sesuai dengan tujuan bahasa dan sastra Sunda diadakan pada tingkat provinsi.

Tabel 1. Posisi khalayak berdasarkan resepsi Stuart Hall

<i>Dominant Reading</i>	<i>Negotiated Reading</i>	<i>Oppositional Reading</i>
		1 murid SD

		2 murid SD
	3 murid SD	
		1 murid SMP
		2 murid SMP
	1 murid SMA	
	2 murid SMA	
		1 orang tua SD
		2 orang tua SD
	3 orang tua SD	
	1 orang tua SMP	
		2 orang tua SMP
	1 orang tua SMA	
	2 orang tua SMA	
		1 guru SD
		2 guru SD
		3 guru SD
	1 guru SMP	
		1 guru SMA

Partisipan dari usia yang berbeda, kalangan yang berbeda dan profesi yang berbeda rata-rata beropini kurang lebihnya serupa. Siswa sebagai objek dari penerapan kebijakan tidak menerima secara umum terhadap regulasi yang mewajibkan bahasa Sunda diterapkan sebagai muatan lokal mengingat terbatasnya ruang gerak bahasa dan budaya Sunda di lingkungannya. Hal ini menyebabkan bahasa dan sastra Sunda hanya dipandang sebelah mata sebagai mata pelajaran teori. Adapun sebagian menerima namun untuk kepentingan komunikasi semata. Orang tua juga mengharapkan anak memiliki identitas etnis Cirebon dikarenakan itulah budaya yang diturunkan dari orang tua. Pengetahuan bahasa dan sastra Sunda hanya diperlukan jika anak pada masa depan mengharuskan mereka berinteraksi dengan masyarakat Sunda. Sedangkan guru memiliki pandangan netral mengingat sebagian besar guru adalah warga Cirebon yang tidak secara natural menggunakan bahasa dan sastra Sunda sebagai kerangka budayanya. Kewajibannya sebagai pengajar dan pendidik hanya berusaha mentoleransi ketimpangan budaya yang dialami siswa.

Adapun keluarga dan pendidikan orang tua, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan ragam bahasa daerah asal merupakan bagian dari proses *decoding* siswa melihat mata pelajaran bahasa

daerah yang diajarkan di sekolah. Waktu anak di sekolah hanya seperlima dari waktu anak keseluruhan khususnya era pandemi. Waktu belajar juga lebih banyak dilakukan di rumah-masing-masing. Porsi waktu yang banyak dihabiskan di lingkungan keluarga. Proses komunikasi juga menjadi lebih intens di lingkungan rumah, namun sebaliknya di lingkungan sekolah. Penggunaan bahasa pada lingkungan keluarga akan merangsang anak-anak dalam lingkungan bahasa daerah yang akan membentuk komunikasi yang konstan pada penggunaan bahasa daerah tersebut. Hal ini juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya identitas etnik yang dimilikinya. Data menunjukkan bahwa responden yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar di rumahnya memiliki identitas etnik yang lebih kuat daripada responden yang memakai bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya (rahman, 2005: 05). Sayangnya bahasa dan sastra Sunda sebagai mata pelajaran teori bersifat praktik pada dasarnya ia juga tidak dapat diterapkan di lingkungan rumah. Artinya pandemi atau tidak, proses penerimaan pesan tidak dapat berjalan dengan baik, setidaknya tidak sebaik kabupaten dan wilayah lain di Jawa barat yang mayoritas penduduknya adalah suku-bangsa Sunda.

Lingkungan masyarakat adalah wadah kedua setelah keluarga. penggunaan bahasa krusial dalam komunikasi sosialisasi karena melibatkan proses penerimaan individu di dalam masyarakat. Dalam permasalahan perbedaan budaya dalam proses pendidikan bahasa daerah pada siswa tingkat SD yang cenderung mengikuti bahasa daerah tempat dia bersekolah. Guru dapat memahami dan mengerti latar belakang budaya murid supaya pendidikan pendekatan multikultural dapat dilakukan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Sayangnya kasus ini tidak terjadi karena guru sendiri juga memiliki perbedaan

identitas etnis yang secara tidak langsung juga memengaruhi guru dalam memberikan materi ajar. Guru dalam pola komunikasi resepsi berada pada posisi yang sama dengan murid. Mayoritas partisipan guru adalah orang asli Cirebon yang tidak menggunakan bahasa Sunda. Kesulitan proses pembelajaran artinya tidak hanya terjadi pada objek ajar melainkan juga subjek ajar. Hal tersebut dapat memunculkan isu baru karena ruang gerak yang terbatas, dan guru sebagai satu-satunya lingkungan bahasa dipraktikan jelas tidak dapat mencukupi. Artinya kebijakan dianggap berat sebelah khususnya bagi para guru yang mengajar bahasa dan sastra Sunda di kabupaten Cirebon. Guru mata pelajaran bahasa daerah yang kurang memperhatikan perbedaan individu berakibat menurunnya minat anak karena materi dan strategi pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi alamiah mereka.

Guru dan murid adalah khalayak yang mengkonstruksi makna keluar dari apa yang ditawarkan (*preferred reading*) oleh pemerintah provinsi. Kebijakan provinsi adalah media yang berusaha mengirimkan pesan melalui pola kebijakan pendidikan dengan melibatkan kuasa politik bernuansa identitas politik kesukuan. Politik etnosentris dijadikan tanda yang kompleks, dimana ia berperan sebagai *preferred reading* yang telah ditentukan dan dituju secara spesifik. Pesan yang dikirimkan ditujukan untuk membentuk khalayak sesuai dengan tujuan pesan atau *preferred reading* dan berpartisipasi dalam pelestarian bahasa daerah sesuai dengan visi dan misi proses decoding. *Preferred reading* diperoleh melalui objek berupa kebijakan politik yang tertuang di dalam peraturan peraturan perundangan daerah. Dominasi dikonstruksi berdasarkan besarnya jumlah penduduk dan kekuatan historis. Pengaruh ini kemudian mendominasi subkultur Jawa barat menjadi kental dan identik dengan satu ciri karakteristik:

Sunda. Besar kecilnya pengaruh ini kurang lebihnya berkontribusi pada pembuatan kebijakan tingkat regional di wilayahnya. Kasus bahasa daerah di Cirebon ini menjadi salah satu akibatnya.

Prinsip dasar resepsi adalah pemaknaan media yang dinegosiasikan oleh khalayak berdasarkan pengalaman hidupnya. Partisipan utama yang merupakan siswa sekolah telah memiliki pengalaman hidup yang ditanam semenjak lingkungan keluarga termasuk siswa SD yang notabene siswa yang pertama kali dikenalkan dengan bahasa Sunda. Kewajiban yang ditanamkan terhadap pelajaran bahasa daerah yang tidak men-daerah menjadikan proses negosiasi lumpuh. Di satu sisi bahasa daerah sendiri yang diajarkan memiliki keterbatasan yang hingga sekarang belum terdapat solusi konkret. Posisi ini menempatkan partisipan siswa berada pada posisi tidak berdaya. Akibatnya, konstruksi subjektif lahir terhadap bahasa Sunda sebagai mata pelajaran yang kurang atau sama sekali tidak aplikatif karena bahasa dan sastra Cirebon sebagai kerangka pengalaman budaya utama cukup jauh dengan pesan yang berusaha dikirimkan pemerintah. Stigma ini muncul hingga bangku menengah atas dimana pelajaran bahasa dan sastra Sunda cenderung diremehkan dibandingkan mata pelajaran lain. Mata pelajaran bahasa daerah bagi penuturnya sendiri saja sudah cukup miris melihat menurunnya minat siswa dalam berbahasa dan berbudaya daerah. Pembelajaran mata pelajaran bahasa dan sastra daerah yang bahkan bahasa dan budayanya sendiri sama sekali tidak digunakan jelas tidak akan menunjukan hasil yang lebih baik.

Wajibnya bahasa dan sastra Sunda menyebabkan bahasa dan sastra lain di lingkup kawasan politik yang sama seakan dikorbankan. Kontradiktifnya pemerintah sebagai pengirim pesan juga melegalkan kelompok-kelompok yang lebih kecil ini secara politik. Pemerintah

seakan memberikan sinyal tertentu dari setiap kebijakan yang diberikan, dan bersifat ambivalen terhadap setiap kebijakan yang digulirkan khususnya yang ditujukan bagi kelompok-kelompok di luar Mayoritas termasuk Cirebon.

SIMPULAN

Regulasi kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah sudah memberi payung hukum yang memberi perhatian bahwa mata pelajaran bahasa daerah harus sesuai dengan latar-belakang budaya masyarakat setempat sekaligus sesuai dengan lingkungan sosial-budaya dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun demikian, penerapan implementasi rupa-rupanya bertolak-belakang (kontradiktif) antara regulasi dengan realitas sehari-hari. Justru, mata pelajaran bahasa daerah yang dijadikan bahan pembelajaran tidak sesuai dengan latar-belakang bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat.

Dampak yang terjadi memperlihatkan bahwa murid-murid mengalami kesulitan memahami dan mempelajari bahasa Sunda karena tidak sesuai dengan latar-belakang sosial-budaya berikut bahasa daerah sehari-hari yang digunakan dalam interaksi sehari-harinya. Kendati, kadar kesulitan itu berbeda sesuai dengan tingkat sekolahnya

Dengan demikian, problem utama terletak pada penafsiran aparat pemerintah daerah yang terikat pada identifikasi sempit terhadap persepsi bahwa Jawa Barat adalah Sunda dan Sunda adalah Jawa Barat. Namun demikian, problem tersebut bukanlah kekeliruan aparat pemerintah daerah di tingkat bawah pemerintah provinsi atau tingkat kabupaten/kota. Problem itu muncul sudah semenjak Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang senantiasa melakukan identifikasi pada salah satu suku-bangsa sebagai pencitraan identitas

budaya daerah. Bukti ini sangat terlihat pada Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi yang seolah-olah kesulitan menerjemahkan identitas budaya daerahnya itu apakah budaya suku-bangsa Sunda atau budaya suku-bangsa Betawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2020.Ketimpangan Masyarakat Pantura, Mendorong Provinsi Cirebon Berpisah dari Jawa Barat.
<https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-83845076/ketimpangan-masyarakat-pantura-mendorong-provinsi-cirebon-berpisah-dari-jawa-barat>. Diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 15:00
- Anonim. 2018. Pelestarian Bahasa Cirebon Tanggung Jawab Siapa? <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01297117/pelestarian-bahasa-cirebon-tanggung-jawab-siapa-424409?page=2> Diakses tanggal 28 Mei 2021 pukul 10:13
- Astriani, Aveny Septi, dkk. 2020. Sikap Berbahasa Masyarakat Kota Cirebon pada Bahasa Cirebon. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7 (1)
- Atep Abdilah Kurniawan. (2020) Provinsi Cirebon, P3C: Agar Masyarakat Pantura Tidak Terperosok Lebih Jauh ke Jurang Kemiskinan. <https://literasinews.pikiran-rakyat.com/politik/pr-92840280/provinsi-cirebon-p3c-agar-masyarakat-pantura-tidak-terperosok-lebih-jauh-ke-jurang-kemiskinan> . Diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 15:00
- Ayatrohaedi.1999. Kebijakan Pemerintah Mengenai Bahasa

- Daerah. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Bachtiar, Ahmad. 2020. *Penetapan zona bahasa sebagai Upaya Pelestarian Bahasa Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat)*. UIN Syarif Hidayatullah
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Cirebon dalam Angka. Cirebon: BPS
- _____. 2020. Kabupaten Cirebon dalam Angka. Cirebon: BPS.
- Budiana, Debi. 2017. Upaya Emansipasi Kaum Difabel melalui Seni di Kabupaten Gianyar Bali. Tesis. Bali: Universitas Udayana.
- Budiawan, R. Yusuf dkk. 2019. Perbandingan Variasi Bahasa Jawa di Kecamatan Tanjung Brebes dengan Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS* Volume 13, No 2.
- Creswell, John.W. 1997. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand oaks California, Sage.
- Dadang Kusnandar. 2012. *Cirebon: Silang Peradaban*. Yogyakarta: Gapura Publishing.com
- Dewi, Eriyanti Nurmala. 2016. Merawat Bahasa Menjaga Budaya: Implementasi kebijakan Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Barat Universitas Padjajaran Kongres Bahasa Daerah Nusantara
- Erika Lia 'Aku' di Antara Isun, Reang, dan Varian Panggilan Khas Cirebon, <https://www.ayocirebon.com/read/2020/02/15/4543/aku-di-antara-isun-reang-dan-varian-panggilan-khas-cirebon>. Diakses pada 28 Mei 2021 pukul 11:27
- Febrian. 2012. Analisis Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terhadap Tayangan Iklan Televisi Layanan SMS Premium Versi Ramalan Paranormal. *THE MESSENGER*, Volume 4, Nomor 1,
- Hall, Stuart., Dorothy Hobson, Andrew Lowe and Paul Willis (Eds.). 1986. *Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Halwah, Siti. 2020. Mata Pelajaran Bahasa Daerah itu Lebih Sulit daripada Bahasa Inggris. <https://mojok.co/terminal/mata-pelajaran-bahasa-daerah-itu-lebih-sulit-daripada-bahasa-inggris/>. diakses tanggal 17 Desember 2020.
- Hariyanti, Mey. 2015. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Web. Diakses pada 17 desember 2020
- Iryani, Ending. 2017. Diglosia antara Bahasa Jawa dan Sunda (Studi Kasus Masyarakat Bahasa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon). *Jurnal Inovasi Pendidikan* MH.Thamrin,
- Jazeri, M. 2010. Menabur Bahasa, Menuai Kuasa (Memahami Relasi Bahasa dan Kekuasaan dalam Iklan Politik). *Lingua Scientia*, Vol 2, No 2
- Kurikulum muatan Lokal SDN 5 Arjawinangun Kurikulum Mulok MPBD-SUNDA SMP-MTs KIKD Basa Sunda SMA-SMK-MA 2013
- Lubis, Coki. 2017. Pantura, Dicampakkan Seusai Pesta. <https://m.medcom.id/telusur/medcom-files/zNPvG6Ak-pantura-dicampakkan-seusai-pesta?> diakses 29 maret 2020 pukul 08:21 WIB
- M. Jazeri. 2010. Menabur Bahasa, Menuai Kuasa (Memahami Relasi Bahasa dan Kekuasaan dalam Iklan Politik). *Lingua Scientia*, Vol 2, No 2 (101-113).

- Mujib, Ahmad, 2009. Hubungan Bahasa dan Kebudayaan (Perspektif Sociolinguistik). *Adabiyat*, Vol.8, No.1, Juni.
- Nasution, Zahri. 2007. Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 3, p 445-464.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- Permen Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
- Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 3 Pasal 7 Ayat 3-8
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- Rosidi, Ajip. 1999. *Bahasa Nusantara Suatu Pemetaan Awal: Gambaran tentang Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Rosita, Ayik, dkk. 2006. Pentingnya Mata Pelajaran Bahasa Daerah dalam Kurikulum Sekolah Dasar dalam Eksistensi Budaya Bangsa. *Pengembangan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, hal 35-43,
- Rozak, Abdul. 2012. Upaya Pengembangan Bahasa Cirebon Melalui Penyiapan Guru Profesional. A Sarasehan Pra Kongres Basa Cirebon.
- Rusyana, Yus. 1999. Penyelenggaraan Pengajaran Bahasa-bahasa Daerah. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Said, Edward. 2001. *Kekuasaan, politik, dan kebudayaan*. New York: Pantheon Books
- Sarasa, Agung Bakti. 2019, Desember 17). Mendag Enggar ingin Karakteristik wong Cirebon dipertahankan. <https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/artikelamp/jabar/10069/mendag-enggar-ingin-karakteristik-wong-cirebon-dipertahankan>
- Setyobudi, I. 2017. *Metode Penelitian Budaya (Desain Penelitian dan Tiga Kualitatif: Grounded Theory, Life History, Narrative Personal)*. Bandung: Sunan Ambu Press.
- Setyobudi, I. 2017. Politik Identitas Animal Pop Dance: Subbudaya dan Gaya Hidup Hibrid. *Sosiologi Reflektif*, Volume 12, NO. 1
- Setiawan, Rahmat. 2018. Subaltern, Politik Etnis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* Vol. 6, No. 1
- Siti Fatimah. 2013. Mengajarkan Bahasa Sunda di Perbatasan Sangat Sulit. <https://jabar.tribunnews.com/amp/2013/09/30/mengajarkan-bahasa-sunda-di-perbatasan-sangat-sulit?page=2>. Diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 15:11
- Sudrayat, Yayat. 2003. Bahasa Daerah Di Wilayah Cirebon (Satu Kajian Sociolinguistik dan Dialektologi)
- Sugiharto, Bambang. 2013. Penerapan Bahasa Daerah pada Kurikulum 2013 di Jawa Barat (diakses pada sabtu, 28 November 2020 pukul 12:14)

- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Sumarti. 2014. Pemeliharaan Bahasa Cirebon sebagai Bahasa Ibu Komunitas Masyarakat Cirebon di Pulau Pasaran Teluk Betung
- Teguh, Irfan. 2017. Memahami Geografi dan Kekuasaan Sunda. Baca selengkapnya di artikel "Memahami Geografi dan Kekuasaan Sunda ", <https://tirto.id/cnnT> diakses pada 01 april 2021 pukul 14:12 WIB
- Tunshorin, Cahya. 2016. Analisis Resepsi Budaya Populer Korea pada Eternal Jewel Dance. *Community* Vol. 10 No. 1 Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara beserta lagu kebangsaan
- UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah
- Utomo, Ficky, dkk. 2020. Politik Etnosentris Semu dalam Kasus Upaya Pemekaran Provinsi (Studi pada Gerakan Pemekaran Provinsi Cirebon).
- Widodo, Pratomo. 2003. Bahasa Jawa Cirebon dalam Komunikasi dan Interaksi Sosial. *Litera*, Volume 2, No.1.

